

## **Pengaruh Struktur Organisasi, *Business Process* Dan Teknologi Informasi, Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya, Dan Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur**

**I Putu Utama Jaya<sup>1</sup>**  
**I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra<sup>2</sup>**  
**I Made Sudiartana<sup>3</sup>**  
*Universitas Mahasaraswati Denpasar*  
email:anggathama08@gmail.com

### ***Abstract***

*Changes or modernization of the tax administration system is one of the government's efforts to improve taxpayer compliance through tax audits. Changes made include organizational structure, business processes and information technology, improvement of resource management, and implementation of good governance. This study aims to reexamine the effect of organizational structure, business processes and information technology, refinement of resource management, and the implementation of good governance on the effectiveness of the implementation of functional audits at the East Denpasar Pratama Tax Office. The analysis shows that Organizational Structure variable had a positive effect on the Effectiveness of the Functional Examination, which was indicated by a significance value of 0.008. Business Process and Information Technology variables do not have an influence as indicated by a significance value of 0.312. Variable Improvement in Resource Management has no influence as indicated by a significance value of 0.546. Good Governance Implementation Variables have a positive effect as indicated by the significance value of 0.006.*

**Keywords:** *Modernization of Administrative Systems, Tax Examination, Organizational Structure, Business Process and Information Technology, Improvement of Resource Management and Implementation of Good Governance.*

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. reformasi pajak ini bersifat lebih sederhana, netral, adil, dan memberi kepastian legal, dengan pembaharuan yang paling mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Salah satu bentuk pengawasan *self assessment system* adalah dengan cara pemeriksaan pajak yang merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh salah satunya melalui perubahan-perubahan dalam bidang Struktur Organisasi, *Business Process* dan Teknologi Informasi, Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya serta Pelaksanaan *Good Governance*. (Diana Sari, 2013).

Menurut Pandiangan (2008) restrukturisasi organisasi adalah aktivitas yang dilakukan organisasi untuk merubah proses dan kendali internalnya dari suatu hirarki vertikal fungsional yang tradisional, menjadi struktur pipih yang horizontal, lintas fungsional dengan berlandaskan kerjasama tim yang berfokus pada proses dapat membuat organisasi lebih nyaman. Hal ini diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien setelah mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Suyanto (2005) pemanfaatan teknologi informasi adalah merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Perbaikan business process dilakukan

antara lain dengan penerapan e-system dengan beberapa fasilitas yaitu *e-filing* ( pengiriman SPT secara online melalui internet), *e-SPT* ( penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (ciri khas pembayaran online untuk PBB), dan *e-registration* ( pendaftaran NPWP secara online melalui internet).

Menurut Pandiangan (2008) penyempurnaan sumber daya manusia adalah merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Rahayu (2017) mengemukakan bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas.

Rahayu (2017) Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Elemen *good governance*, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Dengan adanya pelaksanaan administrasi perpajakan modern diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Kemudahan pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat tercermin tersedianya data yang semula belum terungkap dan data baru yang terungkap yangakhirnya berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan kondisi dimana individu dalam perilaku dipengaruhi oleh niat individu tersebut terhadap perilaku tertentu (Ajzen dalam Subekti, 2016). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan keinginan seseorang untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini keinginan tersebut berguna untuk menjadi salah satu hal yang mendorong perilaku yang menunjukkan kuat atau lemahnya seseorang dalam melakukan sesuatu.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu mempengaruhi sikap, persepsi mereka tentang perpajakan. Sehingga memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi faktor yang mendorong wajib pajak tersebut lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan memacu produktivitas pegawai sehingga pelaksanaan pemeriksaan fungsional akan terpenuhi.

### Hipotesis

H<sub>1</sub> : Struktur Organisasi berpengaruh positif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

H<sub>2</sub> : *Business Process* dan Teknologi Informasi berpengaruh positif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

H<sub>3</sub> : Penyempurnaan Manajemen SDM berpengaruh positif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional Pada Kantor Pembayaran Pajak Pratama Denpasar Timur.

H<sub>4</sub> : Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang berlokasi di Jalan Kapten Tantular No.4, Renon. KPP Pratama ini merupakan kantor pajak yang memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang perpajakan. Peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut sangat cocok dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Penetapan tempat penelitian pada lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa obyek tersebut dapat memberikan keterangan yang lengkap masalah yang diteliti yakni data diperlukan cukup memadai.

Obyek penelitian ini adalah struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya (SDM) dan *good governance* terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono 2013:122). Pengambilan sampel secara tidak acak didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan program SPSS. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	19.448	3.919		4.962	.000
X <sub>1</sub>	.044	.016	.392	2.859	.008
X <sub>2</sub>	.066	.065	.141	1.028	.312
X <sub>3</sub>	.123	.201	.083	.611	.546
X <sub>4</sub>	.043	.015	.424	2.971	.006

Sumber : data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 19,448 + 0,044X_1 + 0,066X_2 + 0,123X_3 + 0,043X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

**Pembahasan**

**Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional**

Hipotesis pertama menyatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa struktur organisasi struktur memiliki nilai koefisien sebesar 0,044 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 sehingga H<sub>1</sub> diterima. Ini berarti bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi sudah berjalan dengan baik seiring dengan diterapkannya sistem administrasi yang baru, maka struktur organisasi perpajakanpun disesuaikan dan diubah berdasarkan fungsi yang mempermudah petugas

melayani wajib pajak dalam penyelesaian administrasi dan dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara bagian di dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa sehingga dengan adanya jalur pemeriksaan membuat wajib pajak lebih taat dalam melakukan perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Data (2018) dan Patsal (2012) yang menyatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

### **Pengaruh *Business Process* dan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *business process* dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa *business process* dan teknologi informasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,066 dengan nilai signifikansi sebesar 0,312 yang lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_2$  ditolak. Ini berarti bahwa *business process* dan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

Hal ini berarti baik atau buruknya *business process* dan teknologi informasi di dalam sistem modernisasi perpajakan tidak akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. *Business process* dan teknologi informasi belum berjalan dengan baik dari segi penerapan e-system begitu pula dengan infrastruktur yang ada dilingkungan sekitar yang diciptakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dengan *full automation* tercipta suatu *business process* dan teknologi informasi yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah dan akurat sehingga seharusnya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional, namun hal ini masih belum dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh wajib pajak karena banyak diantara wajib pajak yang belum paham menggunakan *business process* dan teknologi informasi yang tersedia, namun hal ini tidak terlibat langsung dalam hal pelaksanaan pemeriksaan fungsional yang sudah terstandar dan dilaksanakan oleh aparat pajak yang berkompeten. Maka dari itu walaupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur memiliki sistem *business process* dan teknologi informasi yang baik atau yang belum baik tidak akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Patsal (2012) dan Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa *business process* dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pemeriksaan fungsional.

### **Pengaruh Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya (SDM) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa penyempurnaan manajemen sumber daya (SDM) berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa penyempurnaan manajemen sumber daya (SDM) memiliki nilai koefisien sebesar 0,123 dengan nilai signifikansi sebesar 0,546 lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_3$  ditolak. Ini berarti bahwa penyempurnaan manajemen sumber daya (SDM) tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

Hal ini berarti baik atau buruknya Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya (SDM) di dalam sistem modernisasi perpajakan tidak akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. Hal ini terjadi karena penerapan sistem administrasi modern dalam hal Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya (SDM) belum berjalan dengan baik. Penyempurnaan manajemen sumber daya (SDM) adalah proses pembaharuan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur yang mencakup keahlian fiskus terhadap kecepatan pelayanan wajib pajak, melakukan seleksi terhadap pegawai dengan ketat guna mendapat sumber daya manusia yang berkualitas, pengadaan pelatihan dan

pemetaan guna meningkatkan kualitas SDM agar berjalan efektif dan efisien. Hasil penelitian inididak mendukung penelitian Pratiwi (2015) dan Patsal (2012) yang menyatakan bahwa Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya(SDM) berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

### **Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pelaksanaan *good governance* berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pelaksanan *good governance* memiliki nilai koefisien sebesar 0,043 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_4$  diterima. Ini berarti bahwa pelaksanaan *good governance* berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* sudah berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena penerapan sistem administrasi modern dalam hal Pelaksanaan *Good Governance* yang sering kali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi dalam praktek berorganisasi *Good Governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan atau penyelewengan yang disengaja ataupun tidak disengaja sudah berjalan dengan baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Direktorat Jendral Pajak dengan program modernisasinya senantiasa berupaya untuk menerapkan prinsip *good governance* salah satunya adalah dengan cara pembuatan dan penegakan kode etik. Semakin tinggi sistem modernisasi pelaksanaan *Good Governance* maka efektivitas pemeriksaan fungsional akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Patsal (2012) dan Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya (SDM), dan pelaksanaan *good governance* terhadap efektivitas pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur :

- 1) Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 2) *Business Proses* dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Timur.
- 3) Penyempurnan Manajemen Sumber Daya tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
- 4) Pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap efektivitas pemeriksaan fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Alia, R., & Akhmad, R. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.3 No.10*

- Arini, Diah Sulistia dan Isharijadi.2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. *Volume 4 No.2 Tahun 2015*. Universitas PGRI Madiun.
- Darmayasa, I Gede dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN:2353-1018 Volume 14. 1 Januari 2016. 226-252.
- Data. Rangga Mahendra. 2018. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.
- Fikriah. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 23. Semarang : BPF Universitas Diponegoro.
- Ida, M., & Rusmanto, M. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2)
- Irawan, Hasan dan Siti Khairani. 2009. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Jurnal Akuntansi*.
- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. *Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Hasnudin*. Makasar.
- Maria, Delli. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*. Vol. 01, No. 01, Maret 2013.
- Muhamad Riski Nindar, Sifrid S. Pengemanan, Harijanto Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 1-10 ISSN 2303-1174
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Patsal. 2011. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Fungsional Pada KPP Pratama Makassar. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Makassar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pratiwi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. *Skripsi*. Universitas Bandung.
- Rahayu, S. and Lingga, I.S., 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal akuntansi*, 1(2), pp.p-119. Universitas Kristen Maranatha.
- Rodevilla. 2018. Pengaruh Penerapan Restrukturisasi Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Penyempurnaan Sumber Daya Manusia Dan Motivasi

- Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Vol 13, No 1 (2018).
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari Kurnia Diana, Samrotun Chomsatu Yuli, Dewi Rachmawati Riana. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta*. Seminar nasional IENACO. Universitas Batik Islam Surakarta. ISSN: 2337-4349
- Setiawan. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. *Skripsi*. Universitas Jakarta.
- Sinta setiana, Tan Kwang dan Lidya Agustina. 2010. Pengaruh Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak (survey terhadap kantor pelayanan pajak Bandung Bojonegara). *Skripsi*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2009. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siti Kurnia Rahayu 2017. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Silvi. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Bandung.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sungkar. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional. *Skripsi*. Universitas Jakarta.
- Tryana A.M. Tiraada, 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Wahyu. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Univeritas Cirebon.
- Widya K Sarunan. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- www.infopajak.com